

# Mewujudkan Dialog untuk Perdamaian di Tanah Papua

**Hamim Mustofa**

Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Papua

## **Pendahuluan**

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 menandai sejarah baru di Papua bagian barat (*West Papua*). Pepera dilakukan untuk menentukan apakah Irian Barat bersedia bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka.<sup>1</sup> Walaupun sudah 52 Tahun sejak Pepera konflik juga belum usai. Karena, Pepera 1969 belum dapat diterima oleh rakyat Papua. Pepera dianggap tidak demokratis, Pepera dianggap tidak melibatkan orang Papua dan hanya diwakili dan penuh dengan tekanan dan ancaman hingga terjadi berbagai operasi militer di sejumlah wilayah di Papua.<sup>2</sup>

Berbagai aksi protes dan penolakan terhadap proses politik Pepera 1969 terus dilakukan hingga sekarang. Melalui demonstrasi damai, diskusi-diskusi ilmiah, upaya menginternasionalisasi isu-isu Papua dan upaya-upaya lain untuk mendorong dilakukannya referendum Papua. Aksi - aksi tersebut selalu direspon dengan pendekatan keamanan dan pendekatan hukum dengan dalih makar. Namun, pendekatan tersebut juga belum bisa menyelesaikan masalah hingga hari ini.

Akibat konflik tersebut menyebabkan berbagai kebijakan pembangunan tidak berjalan sesuai harapan. Berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM terjadi di Papua hingga hari ini. Pendekatan keamanan justru menimbulkan sejumlah kekerasan dan menambah masalah baru. Upaya penyelesaian konflik dengan jalan kekerasan ini telah mengakibatkan jatuhnya korban pada kedua belah pihak yang bertikai. Namun jumlah korban lebih banyak orang Papua yang hidup di kampung-kampung yang terisolir (Neles, 2009).<sup>3</sup>

Masalah Papua harus diselesaikan dengan hati-hati agar tidak ada korban kedua belah pihak. Terlebih masalah Papua sudah menjadi perhatian Dunia Internasional. Terutama Negara-negara yang ada di bagian Pasifik yang tergabung dalam *Pacific Islands Forum* (PIF) yang cukup konsisten membawa isu Papua kedalam forum-forum Resmi PBB dan Forum-forum Internasional lainnya.

Selain Pendekatan keamanan, pemerintah juga melakukan pendekatan kesejahteraan melalui Undang-undang No. 21 Tahun 2021 Tentang Otsus Papua yang sudah 20 Tahun berlaku, ternyata belum bisa menyelesaikan masalah Papua. Bahkan, sejumlah kekerasan terus terjadi di Papua. Sebagai mana konflik bersenjata di Kabupaten Nduga dan terjadi pengungsian besar-

---

<sup>1</sup> Baca selengkapnya di artikel "Sejarah Pepera 1969: Upaya Lancung RI Merebut Papua?", <https://tirto.id/egAj>

<sup>2</sup> Baca <https://jubi.co.id/warinussy-52-tahun-berlalu-orang-papua-tetap-menolak-hasil-pepera/>

<sup>3</sup> Neles Tebay, 2009, Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua

besaran karena ketakutan dan terdapat korban meninggal 182 orang pengungsi.<sup>4</sup>

Selain kekerasan dan pelanggaran HAM isu lain adalah adanya rasisme terhadap orang Papua. Terutama isu rasis yang terjadi di Malang dan Surabaya terhadap mahasiswa Papua tahun 2019. Yang menyebabkan aksi penolakan rasisme dan menuntut penegakan hukum dan berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat.<sup>5</sup>

### **Pendekatan Bias Jakarta**

Dengan berbagai pendekatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pendekatan keamanan, pendekatan hukum dan kesejahteraan belum juga mampu menyelesaikan masalah Papua. Karena pendekatan tersebut masih menggunakan perspektive Jakarta yang belum dapat diterima orang Papua. Sebagaimana telah LIPI petakan akar masalah Papua dalam buku Papua Road Map menjadi 4 diantaranya Status Politik Papua, Kekerasan dan Pelanggaran HAM, kegagalan pembangunan, marginalisasi dan diskriminasi (Muridan, 2009).<sup>6</sup> Dan berbagai masalah lain yang harusnya pemerintah dapat lebih terbuka untuk melihat persoalan Papua secara utuh dan mendasar yang sudah cukup lama disuarakan.

masalah Papua paling tidak dapat diselesaikan secara bertahap. Yang terjadi justru semakin meningkatnya kekerasan di sejumlah daerah di Papua yang diakibatkan karena politik, masalah investasi, dan hak ulayat masyarakat adat. Lagi-lagi pendekatan yang digunakan adalah keamanan dan kekerasan yang Otonomi Khusus (Otsus) menjadi salah solusi dengan harapan berbagai menimbulkan korban kekerasan terhadap masyarakat sipil. Bahkan pengiriman pasukan cenderung lebih masif ke beberapa wilayah di pegunungan dengan dalih menumpas sparatis.

Begitu lamanya konflik Papua yang tidak berujung selesai yang menyebabkan frustrasi, rasa dendam, marah dan semua perasaan timbul. Bagaimana tidak? Orang Papua meminta lain dan kemudian di kasih UU Otsus Papua yang harusnya memberikan jaminan kehidupan orang Papua justru sebaliknya. Inilah yang kemudian menambah frustrasinya bagi perjuangan rakyat Papua. Bagaimana tidak meminta sesuatu, dijawab dengan sesuatu yang tidak sesuai harapan dan keinginan. Seperti banyak orang Papua kebanyakan mengistilahkan "*latihan lain main lain*".

---

<sup>4</sup> Baca <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49345664> Korban meninggal akibat konflik di Nduga, Papua 182 orang: 'Bencana besar tapi di Jakarta santai-santai saja'

<sup>5</sup> <https://www.merdeka.com/peristiwa/kronologi-lengkap-peristiwa-di-malang-dan-surabaya-berbuntut-kerusuhan-papua.html?page=3>

<sup>6</sup> Muridan dkk, 2009, Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future hal. 7

Menurut Teori Implementasi Kebijakan (George Edward III, 1980:1), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Dalam teori ini terdapat 4 variabel (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Dalam variabel tersebut di atas salah satu yang penting adalah komunikasi. UU Otsus tidak melalui proses komunikasi yang dapat diterima orang Papua. sehingga, penolakan terhadap otsus dilakukan orang Papua. hal ini ditandai pada tahun 2005 ribuan masyarakat di Kota Jayapura melakukan aksi pengembalian Otsus Papua ke Pemerintah melalui DPR Papua yang diinisiasi oleh Dewan Adat Papua (DAP).<sup>7</sup> Hingga sekarangpun masih terjadi penolakan terutama adanya revisi UU Otsus Papua.

Penolakan kebijakan UU Otsus tersebut menyebabkan berjalannya pembangunan tidak maksimal. Sebab, otsus harusnya mendapatkan legitimasi oleh rakyat yang seharusnya sebagai subyek dan objek dari pembangunan tersebut. Hal ini justru sebaliknya, sejak otsus berlaku timbul sejumlah masalah baru. Otsus juga dianggap sebagai rekayasa politik Jakarta dan bukan solusi untuk menentukan nasibnya sendiri.<sup>8</sup> Hal tersebut juga disampaikan oleh sejumlah mahasiswa ketika melakukan aksi otsus jilid 2.

Berbagai pendekatan sudah dilakukan, termasuk kunjungan presiden Jokowi ke Papua yang sudah berulang kali tidak merubah keinginan orang Papua untuk merdeka. Idiologi Papua Merdeka Harga Mati adalah masalah "RASA" kebangsaan sebagai orang Papua. Hal yang sama dengan Idiologi NKRI Harga mati adalah soal rasa sebagai orang Indonesia. Sehingga, menyelesaikan masalah Papua harus dengan "RASA" bukan dengan memaksakan kehendak untuk memiliki Idiologis yang sama. Sehingga, tidak akan ketemu "Rasanya" karena memang beda "Rasa". Oleh karena itu pemerintah harus memiliki itikad baik dalam menyelesaikan masalah Papua dengan jujur dan terbuka.

Dengan berbagai persolan dan berbagai kegagalan pendekatan yang selama ini sudah dilakukan belum juga menyelesaikan masalah Papua. Sehingga penulis ingin menggarisbawahi dengan berlarutnya penyelesaian masalah Papua berpengaruh terhadap kepercayaan. Bahwa salah satu aspek penting dari kegagalan penyelesaian tersebut salah satunya karena sudah tidak ada kepercayaan "*trust*" dari rakyat Papua kepada pemerintah dan begitu sebaliknya. Sehingga, kepercayaan diantara para pihak juga menjadi salah satu modal penting untuk menyelesaikan masalah Papua.

Sejumlah hal di atas tersebut menyebabkan pemerintah seolah kehilangan formulasi menyelesaikan masalah Papua. Dengan berbagai cara sudah dilakukan, tetapi juga belum bisa diselesaikan. Sepertinya sangat sulit dan

---

<sup>7</sup> Baca <https://nasional.tempo.co/read/65202/ribuan-orang-dari-dewan-adat-papua-kembalikan-otonomi-khusus>

<sup>8</sup> <https://www.suara.com/news/2021/05/25/230000/ratusan-ribu-rakyat-papua-teken-petisi-tolak-otsus-hanya-rekayasa-politik-jakarta>

tidak mungkin bisa diselesaikan kalau tidak dengan mengakomodasi apa yang menjadi keinginan atau tuntutan Rakyat Papua. Apakah seperti itu?

### **Bagaimana Seharusnya Menyelesaikan Masalah Papua?**

Dengan berbagai masalah yang ada di atas dan pendekatan yang sudah dilakukan semua pihak perlu merubah paradigma penyelesaian dengan Dialog. Dialog adalah cara yang tepat dan Dialog adalah rumah besar penyelesaian masalah Papua. Dialog Bukan NKRI harga Mati atau Papua Merdeka Harga Mati. Sebagaimana Koordinator dan Tokoh inisiator Jaringan Damai Papua (JDP) Alm.Dr. Pater Neles tebay dan alm. Dr.Muridan Satriowidjojo mengatakan bahwa “dialog tidak membunuh siapapun dan dialog adalah cara yang humanis untuk menyelesaikan masalah Papua. Dialog adalah untuk mendapatkan Harga yang Hidup bagi semua pihak.

Dengan dialog para pihak dapat menyampaikan semua masalahnya secara terbuka. Baik masalah politik, hukum, keamanan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dengan dialog masing-masing pihak bisa saling memahami satu dengan yang lainnya. Dengan dialog juga orang dapat mengemukakan berbagai solusi yang dapat ditawarkan para pihak. Para pihak juga dapat melakukan perundingan untuk menyepakati solusi yang ditawarkan dan dijalankan kedepannya.

Sehingga dialog harus diberikan tempat dan diterima semua pihak sebagai cara untuk mencari solusi bersama-sama dalam menyelesaikan masalah Papua. Bukan lagi menjadi kata yang dicurigai banyak pihak. Untuk itu mari kita mulai percaya dengan kata “DIALOG” sebagai cara untuk mencari solusi bersama penyelesaian masalah Papua untuk mewujudkan Papua Tanah Damai.

Dialog perlu diyakini sebagai cara untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan kemanusiaan. Semua pihak harus merubah paradigmanya bahwa dialog bukan untuk saling meraih kemenangan dan mengalahkan lawan. Tapi dialog untuk merangkul semua pihak untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dengan menjunjung tinggi kemanusiaan. Sehingga pemerintah Indonesia dan rakyat Papua harus sama-sama terbuka, jujur dan tidak ada ancaman dalam proses dialog barulah dialog bisa berjalan dengan baik.

### **Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan penulis ingin sampaikan bahwa menyelesaikan Papua harus dengan niat yang baik dari para pihak ada *political will*. Konflik Papua harus diselesaikan secepatnya karena sudah berlarut-larut sehingga kedepan tidak muncul masalah yang lebih besar dan semakin rumit. Tidak ada lagi korban yang berjatuh karena konflik berkepanjangan. Dialog harus dilaksanakan untuk menghentikan berbagai masalah di Papua dan untuk perdamaian yang abadi di Tanah Papua.